

**RESOLUSI KONFLIK PERSPEKTIF LEWIS A. COSER  
(Studi Tentang “Tradisi Damai” Masyarakat Desa Batu Badak  
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**CONFLICT RESOLUTION LEWIS A. COSER’S PERSPECTIVE  
(Study of "Peaceful Traditions" of the Batu Badak Villages, Marga  
Sekampung, East Lampung)**

**Musahwi<sup>1</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

*musahwi@syekhnurjati.ac.id*

**Pitriyani<sup>2</sup>**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*yanipitri56@gmail.com*

**ASBTRAK:** Memberi arti pada konflik sosial secara positif bagi masyarakat Indonesia cenderung sulit ditemukan. Kebanyakan konflik sosial dipahami secara destruktif terhadap tatanan sosial. Hal ini dapat berakibat pada cara menghadapi dan menyelesaikan pertentangan dengan cara menentang atau setidak-tidaknya, menegasikan salah satu pihak. Sehingga resolusi konflik sosial hanya mampu meredam dengan tekanan dan sewaktu-waktu konflik dapat menyala seperti api dalam sekam. Artikel ini ingin menghadirkan hal sebaliknya melalui perspektif konflik dari Lewis Coser dengan mengkaji “Tradisi Damai” pada masyarakat Desa Batu Badak Lampung Timur. Tesis Lewis Coser menempatkan konflik secara positif dan fungsional terhadap tatanan struktur sosial. Pada masyarakat Desa batu Badak banyak dihuni oleh para pendatang sejak program transmigrasi bergulir. Konflik sosial sering menyebabkan ketegangan antar etnis maupun agama. Namun, masyarakat memiliki cara unik menyelesaikan konflik, yaitu membangun “Tradisi Damai” di antara masyarakat yang berkonflik, sehingga resolusi konflik sosial berakhir dengan keintiman dan sistem keanekaragaman sosial berjalan secara harmoni. “Tradisi Damai” selaras dengan konsep katup penyelamat (safety valve) gagasan utama resolusi konflik Lewis Coser.

**Kata Kunci:** Resolusi Konflik; “Tradisi Damai”; Katup Penyelamat.

**ASBTRACT:** Giving meaning to social conflict in a positive way for Indonesian people tends to be difficult to find. Most social conflicts are understood to be destructive to social order. This can result in a way of dealing with and resolving conflicts by opposing or at least negating one of the parties. So social conflict resolution is only able to be suppressed by pressure and at any time conflicts can flare up like fire in the husks. This article wants to present the opposite through the perspective of conflict from Lewis Coser by examining the peaceful traditions in the people of Batu Badak Village, Lampung Timur. Lewis Coser's thesis places conflict positively and functionally on social structures. The people of Batu Badak Village have been inhabited by many migrants since transmigration program began. Social conflict often causes tension between ethnic and religious groups. However, society has a unique way of resolving conflicts, namely building "Damai" traditions among conflicting communities, so that social conflict resolution ends with intimacy and a system of social diversity running in harmony. The Damai traditions is in line with the concept of a safety valve, the main idea of Lewis Coser's conflict resolution.

**Keyword:** Conflict Resolution; “Peaceful Tradition”; Safety Valve.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu dilibatkan pada sebuah perbedaan yang berujung pertentangan dan persaingan. “Konflik” sebagai kata lain dari penggambaran kondisi tersebut seringkali dipandang sebagai suatu rangkaian fenomena kekerasan dan peperangan. Tak hanya pada mata masyarakat umum, para ilmuwan sosial pun cenderung menyoroti konflik pada dimensi negatif. Konflik dianggap sebagai *pelecehan* terhadap tatanan sosial, stabilitas dan persatuan layaknya sebuah tindakan yang merusak dan memecah-belah. Hal ini karena, unsur yang kerap dilekatkan oleh masyarakat pada konflik adalah pertarungan menang-kalah bahkan dengan cara mencari legitimasi kebenaran yang dapat memperkuat diri dan kelompok masing-masing.

Kokohnya konstruksi masyarakat dalam mengartikan konflik sebagai sebuah anomali pada akhirnya memicu persoalan baru mengenai mekanisme penyelesaiannya. Pemaknaan konflik sebagai arena perebutan kebenaran membuat pihak yang terlibat saling membela nilai-nilai yang mereka anggap benar dan tak jarang memaksakan pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut. Sehingga proses penyelesaiannya acap kali melibatkan kekerasan dalam proses meredam konflik. Sosok yang biasanya pasang badan adalah pihak keamanan (*peace keeping*), dimulai dengan menetapkan serangkaian aturan dan sanksi terhadap salah satu pihak. Namun, pada praktiknya mekanisme semacam itu hanya meredam konflik untuk waktu tertentu tanpa menjamin kemungkinan konflik tidak akan mencuat kembali. Melihat kenyataan ini, masih lekat memori kolektif publik pada sederet konflik yang terjadi di Indonesia, misalnya saja konflik krisis keamanan masyarakat Desa Wadas Jawa Tengah akibat pembangunan bendungan dan penambangan batu andesit 2019-2022, kasus serupa juga terjadi di Jambi antara komunitas adat Orang Rimba dan Korporasi 2016-2021, Penambang timah ilegal di Bangka Belitung 2021-2022, dan konflik antar warga di Maluku Tenggara 2022. Deretan konflik tersebut meski terselesaikan oleh bantuan pihak kepolisian namun sifatnya sesaat dan kembali berulang.

Rentetan konflik sosial yang berulang dengan masalah yang sama di masyarakat membutuhkan strategi penyelesaian yang melibatkan unsur nilai yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Coser memaknai konflik sebagai bentuk sosialisasi,<sup>1</sup> Ia melihat konflik tidak hanya mengancam dan kehancuran struktur sosial namun juga

---

<sup>1</sup> Rosyana, Elly. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan*, Vol X No 2, 2015.

bagian dari elemen penting dalam pembentukan dan pemelihara identitas kelompok. Fungsi tersebut terbentuk dalam kelompok *in-group*. Setidaknya terdapat tiga konsep penting yang menjadi landasan pemikiran Coser<sup>2</sup> pertama, konflik sebagai bentuk ‘*alarm*’ adanya ketidakberesan dalam kelompok masyarakat; kedua, mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan berkontribusi terhadap munculnya sistem dan struktur sosial yang baru; dan yang ketiga, konflik dapat ‘menerjemahkan suasana’ atau pelepasan ketegangan antar pihak yang antagonis yang disebut dengan “Katup Penyelamat” (*safety valve*). Ketiga gagasan utama Coser ini nampaknya sejalan dengan mekanisme budaya pengelolaan konflik pada masyarakat Lampung di tengah tingginya gejolak heterogenitas di sana. Resolusi konflik melalui pendekatan “dari dalam” berasal dari sensitivitas masyarakat untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat Lampung terutama mengantisipasi ancaman dan perdamaian konflik.

Politik etnis (*ethische politiek*) yang dilakukan kolonial Belanda dan pemerintah Orde Baru, memosisikan masyarakat Lampung sebagai tuan rumah penyambutan program migrasi orang Jawa pertama pada tahun 1905 -1990. Sejak saat itu arus migrasi yang masuk ke Lampung secara bergelombang terus berdatangan. Tak hanya orang Jawa, pemerintah Indonesia juga memindahkan orang Bali ke Lampung sebagai upaya perluasan pembangunan.<sup>3</sup> Komposisi penduduk yang tidak seimbang antara pribumi dan pendatang akhirnya memunculkan gejolak sosial di Lampung. Isu agama dan perebutan lahan pun menjadi konflik hangat yang mendominasi kehidupan masyarakat hingga sekarang. Berdasarkan data Komnas HAM tercatat setidaknya 1.000 konflik yang pernah terjadi sejak pasca reformasi 1998 sampai 2015 terutama konflik sengketa SDA/lahan.<sup>4</sup> Di tengah gemuruh perbedaan dan konflik antar etnis yang terjadi, masyarakat Lampung tetap teguh menjaga keharmonisan tatanan sosial dan identitas kelompok, khususnya komunitas adat pribumi. Lampung Timur sebagai daerah rawan konflik adalah sebagian masyarakat Lampung yang hingga saat ini masih mempertahankan sistem adat tersebut, terutama dalam mendamaikan suatu konflik.

---

<sup>2</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

<sup>3</sup> Budianto, Aan. “Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an.” *Jurnal Candi* Vol. 20 No.1, 2020: 18-31.

<sup>4</sup> Muslihah, Eni. *Komnas HAM: Lampung Masuk Tiga Besar Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Kompas.com, 2015.

“Tradisi Damai” adalah ritualisasi pasca konflik melalui penyembuhan luka batin untuk merekatkan hubungan yang sempat terputus. Skema perdamaian konflik dengan memperkuat hubungan antar antagonis menjadi seorang saudara layaknya satu ibu dan bapak. Nilai agama dan keeratan kekerabatan yang menyelimuti setiap rangkaian tradisi menjadi mekanisme khusus menjaga kelompok dari kehancuran akibat konflik. Pengucapan ‘*sumpah/janji persaudaraan*’ sebagai simbol perdamaian melekat pada setiap antagonis yang wajib ditanam pada diri anggota kelompok dimana pun mereka berada. Dalam hal ini, Coser sendiri mengungkapkan bahwa fungsi lain dari konflik adalah dapat menguatkan moralitas dan solidaritas kelompok (*in-group*). Proses semacam ini sebagai bentuk rekonsiliasi konflik dalam kerangka kerja adat tradisional dalam menyelesaikan ketegangan agresifitas permusuhan dan menciptakan perdamaian bagi masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang bentuk kebudayaan pasca konflik dalam hal persepektif teori Lewis A. Coser sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Untuk itu, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang dapat mendeskripsikan secara rinci relevansi nilai yang terkandung pada “Tradisi Damai” dengan teori Katup Penyelamat Coser. Menurut Sugiyono<sup>5</sup> deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data. Studi ini menekankan pada fungsi pasca konflik melalui sebuah tradisi bernama “Tradisi Damai” sebagai upaya perdamaian antar masyarakat di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur. Data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara mendalam dengan informasi dan observasi langsung, yaitu pengumpulan data berupa rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan observasi yang diambil langsung dari lokasi terjadinya konflik.

---

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lampung Timur sebagai Lumbung Konflik Sosial

Wacana kependudukan pada era setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu dianggap sepaket dengan masalah sosial kemiskinan dan kriminalitas. Menurut Sri dan Edi Swasono<sup>6</sup> hal demikian karena kepadatan penduduk telah memperlambat rencana pembangunan nasional pada saat itu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah Orde Baru dalam meneruskan kebijakan pemindahan sebagian penduduk pulau Jawa yang sebelumnya telah dilakukan oleh kolonial Belanda. Tanah Lampung menjadi salah satu tujuan utama dalam program penanggulangan kepadatan penduduk tersebut, karena dianggap sebagai wilayah yang sudah terbiasa akan pendatang sejak dulu. Alhasil hingga saat ini, daerah paling ujung selatan pulau Sumatera itu ditempati oleh berbagai suku, diantaranya Jawa, Bali, Lombok, Minang/Padang, Banten, Palembang, Aceh, Makassar dan keturunan warga asing (China dan Arab). Rekayasa sosial pemerintah ini menunjukkan gejala peningkatan dalam hal pertumbuhan penduduk di wilayah Lampung khususnya masyarakat suku Jawa. Komposisi jumlah penduduk pendatang pun melampaui pribumi secara signifikan pasca program transmigrasi tersebut. Di tahun 1961 jumlah penduduk asli Lampung hanya sebesar 554.848 jiwa, sedangkan pendatang sudah menyentuh angka 1.114.152 jiwa<sup>7</sup> atau jika melihat data terkini suku Jawa di Provinsi Lampung telah mendominasi dengan jumlah penduduk 62% dibandingkan penduduk asli yang hanya sebesar 25% saja.<sup>8</sup>

Ketidakseimbangan antar-masyarakat pribumi dan pendatang pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial yang tinggi di beberapa wilayah Lampung terutama Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat adat Lampung Timur seringkali merasa terancam atas hak-haknya dan berusaha menolak program pembangunan negara maupun korporasi yang dianggap selalu berpihak pada pendatang. Aksi perlawanan yang dipelopori tokoh adat seperti masyarakat Lampung Timur dilatarbelakangi oleh harapan mereka yang menginginkan agar adanya kesetaraan hak kepada pemerintah agar tidak hanya fokus pada kepentingan pendatang. Seperti yang sempat dikatakan oleh tokoh adat Desa Batu Badak yang dijadikan informan sebagai berikut:

<sup>6</sup> Budianto, Aan. "Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an." *Jurnal Candi* Vol. 20 No.1, 2020: 18-31. hlm. 22

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>8</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, 2022 diakses dari [www.bpkp.go.id/lampung/konten/131](http://www.bpkp.go.id/lampung/konten/131)

“Pembunuhan sadis akibat sengketa lahan sampai sekarang belum selesai tapi udah enggak ada perang. Penyebabnya yang mengelola orang Jawa bukan asli Lampung. Seharunya pribumi yang diutamakan, mereka orang luar, sementara lahannya pribumi”.<sup>9</sup>

Awal konflik sosial menurut Coser dimulai dengan suatu perjuangan nilai dan pengakuan terhadap status yang langka yang kemudian, kekuasaan dan sumber pertentangan lainnya ikut disematkan. Struktur dengan mobilitas yang tinggi permusuhan seperti yang terjadi pada masyarakat Lampung Timur dengan pendatang menunjukkan yang disebut Coser sebagai peluang atau wadah arena pertarungan konflik. Semakin tinggi ketertarikan ‘strata’ yang diinginkan maka banyak pula kesempatan untuk terjadinya konflik.<sup>10</sup> Dalam hal ini, Coser sependapat dengan ide Simmel soal konflik dapat menetapkan batasan antar kelompok dengan memperkuat kesadaran akan keterpisahan dari kelompok lain atau gagasan mengenai *in-group*, *out-group* dan posisi hierarkis yang terpelihara melalui konflik. Misalnya, pada peristiwa konflik yang di ungkapkan oleh tokoh Adat di atas. Antara pribumi dan pendatang terdapat batasan yang jelas ditengah persaingan sengketa lahan yang sekaligus menjaga stabilitas struktur dan identitas antar kelompok tersebut. Hal ini terlihat pada peta wilayah yang menegaskan batasan tersebut yaitu pemisahan wilayah pemukiman antara warga asli/pribumi dengan pendatang (orang Jawa) di Desa Batu Badak Lampung Timur. Dua dari tujuh dusun mereka, yaitu dusun Tulang Wojo dan dusun Gunung Langkak dipisahkan jauh dari pusat desa dan lima dusun warga pribumi.

Rasa tidak suka dan kecemburuan sosial masyarakat Lampung sebenarnya tak pernah signifikan pada satu kelompok saja, namun tergeneralisasi pada kelompok lainnya sebagai status kelompok pendatang. Konflik antar etnis di Lampung telah melahirkan kekuatan tersendiri terhadap individu dalam kelompok pribumi khususnya, dimana setiap munculnya permasalahan dengan kelompok pendatang (*out group*) akan membangkitkan moralitas dan perasaan individu sebagai bagian dari kelompok.<sup>11</sup> Seorang informan dengan inisial G, orang yang lahir dan besar sebagai orang Lampung dengan sangat terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada kelompok

<sup>9</sup> Wawancara dengan Informan J, 03 Juli 2021.

<sup>10</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

<sup>11</sup> *Ibid*.

orang Bali yang bermukim di Lampung Selatan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kebiasaan menyembah patung seperti kelompok pendatang orang Bali.<sup>12</sup>

Etnosentrisme yang tinggi dan cenderung fanatis pada kelompok pribumi menciptakan pola pikir negatif tentang orang lain, dan jika tidak dapat dibendung dapat muncul dalam tindakan yang sering menjadi cikal bakal konflik yang lebih terbuka dan intens. Konflik yang awalnya bersifat pribadi dan subjektif berkembang dan berubah menjadi luas dan impersonal dengan melibatkan individu lain sebagai sebuah kelompok.<sup>13</sup> Seorang informan dengan inisial R mengungkapkan sebagai berikut:

“saat warga sini ada yang meninggal terbunuh di Kampung Bali. Saat itu kami menyelesaikan dengan cara sadis, dibunuh juga! Nyawa dibalas nyawa!”<sup>14</sup>

Coser menilai alur tersebut sebagai perjuangan yang diobjekkan, ketika momen itu terjadi maka konflik akan melampaui masalah pribadi dan cenderung lebih parah dan radikal.<sup>15</sup> Sebab para pihak memahami diri mereka sebagai perwakilan dari kolektif kelompok pribumi yang berjuang dan membela anggota mereka, hal demikian sebagai bagian dari tujuan dan cita-cita kelompok. Adapun cita-cita yang dimaksud adalah sikap tegas dan perlawanan dalam mempertahankan kehormatan kelompok sebagai pribumi. Keterbukaan para pendahulu mereka kepada orang pendatang telah menanamkan traumatik akan kehilangan kehormatan terutama terhadap hak kontrol atas tanah adat mereka sendiri. Menurut sejarawan asal Lampung, Wakidi, mengatakan bahwa faktor utama keberhasilan Belanda menjalankan program transmigrasi adalah falsafah hidup orang Lampung yang terbuka menerima pendatang atau lebih dikenal dengan istilah *Pi'il Pasenggiri*.<sup>16</sup> Namun menurut mereka penerimaan yang diberikan oleh nenek moyang mereka terhadap para pendatang tidak dibalas dengan kebaikan, justru kurang menghargai warga pribumi, yang akhirnya menyebabkan munculnya gejolak sosial akibat berbagai peristiwa perampasan hak lahan dan aspek sosial lainnya.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Informan G pada 02 Juli 2021.

<sup>13</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Informan R pada 03 Juli 2021

<sup>15</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

<sup>16</sup> Pernyataan ini dapat diakses pada website okezon.com berikut: Jaya, Tri Purna. *Awal Mula Kedatangan Transmigran Jawa ke Lampung*. Artikel, Jakarta: Okezone.com, 2013.

Salah satu isi falsafah *Pi'il Pasenggiri* sendiri sebenarnya berisi tentang pemurah, tangan terbuka dan suka memberi dan menerima, yaitu *Nemui-Nyimah*. Namun keterbukaan diberikan oleh masyarakat tergores oleh sejarah kelam berbagai sengketa SDA/lahan dengan para pendatang. Unsur kebencian dan moralitas kelompok kian menjadi kekuatan dan alat kontrol kekuasaan pribumi yang kini mengkonstruksi generasi mereka secara kolektif dengan menstigmakan pendatang layaknya seorang "*Pencuri/Perampas*". Konflik dengan kelompok luar (*out-group*) akan secara otomatis meningkatkan kohesi internal terutama pada kelompok dengan sistem sosial yang memiliki solidaritas yang tinggi. Kekerasan dan kata '*perang*' telah menjadi bagian kehidupan masyarakat di sana. Kedua elemen tersebut pun tak hanya melekat pada orang dewasa saja namun juga kepada anak-anak mereka. Informan R misalnya, saat usianya menginjak 12-15 tahun ia mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dengan perkelahian antar individu maupun kelompok (tawuran).

Gejala ketegangan sosial antara pendatang dan masyarakat pribumi/asli Lampung melalui berbagai konflik yang terjadi pada dasarnya merupakan perwujudan dari konflik realistik yang dijelaskan oleh Coser. Konflik tersebut muncul dari masyarakat yang frustrasi terhadap tuntutan tertentu atau konflik akan terselesaikan jika tujuan yang diinginkan tercapai.<sup>17</sup> Dalam kasus ini, objek yang menjadi tujuan dan tuntutan masyarakat adalah SDA/lahan dan akses pemanfaatannya. Namun, kuatnya identitas dan tingginya rivalitas antara kedua kelompok membangkitkan perasaan yang sangat kuat (dendam) dan berujung pada konflik yang intens. Ada pembelokan dari konflik atas objek lahan terhadap isu identitas. Terjadinya pembelokan objek konflik yang tidak berorientasi pada pencapaian sebelumnya, hal ini dilihat oleh Coser sebagai sebuah bentuk konflik non realistik, konflik sukar untuk distabilkan dan tak jarang menjadi wadah balas dendam dengan mengkambing hitamkan salah satu pihak yang berkonflik.<sup>18</sup> Ketegangan konflik yang terjadi termanifestasikan ke dalam beberapa data konflik rasial yang dijabarkan pada **Tabel 1.** yang pernah terjadi di Desa Batu Badak maupun konflik yang melibatkan masyarakat di sana berdasarkan informasi langsung dari masyarakat setempat.

<sup>17</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

<sup>18</sup> Nursantari, Arum R. "Konflik Sosial dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Lewis A. Coser)." *BAPALA*, 2018: 1-7.

**Tabel 1.** Sebaran Konflik di Desa Batu Badak

Pihak yang Berkonflik	Lokasi Konflik	Penyebab Konflik
Kab. Lampung Timur vs Desa Malangsari Kab. Lampung Selatan	Desa Batu Badak	Penganiayaan salah seorang masyarakat Kab. Lampung Timur yang diduga pelaku begal motor di Desa Malangsari (Kampung orang Bali
Desa Batu Badak vs Desa Giri Mulyo	Desa Batu Badak	Tewasnya warga Desa Batu Badak yang dilakukan warga Desa Giri Mulyo, hingga dendam antar kedua kelompok <i>“nyawa dibalas nyawa”</i> .
Desa Batu Badak vs Desa Jabung	Desa Batu Badak dan Desa Jabung	Warga Desa Batu Badak ditabrak oleh warga Desa Jabung, hingga menjadi dendam antar kedua kelompok. Kemudian Pemuda Desa Jabung melakukan pembunuhan dengan membakar hidup – hidup pemuda Desa Batu Badak pada pertandingan bola antar kampung,.
Kampung Batu Badak vs Kampung Bojong	Desa Batu Badak	Dendam antar kampung . Pemuda Kp. Batu Badak di lempar batu pada saat membawa motor hingga jatuh oleh pemuda Kp. Bojong
Konflik Tawuran antar remaja	Desa Batu Badak	Rivalitas atau dendam antara Desa Batu Badak dengan Desa Bojong yang sudah cukup lama
Konflik saling tusuk	Desa Gunung Raya	Rebutan <i>‘Biduan’</i> (Penyanyi Dangdut) ketika acara pesta pernikahan yang diadakan di Desa Gunung Raya.
Pengeroyokan kepada pemuda Desa Batu Badak	Desa Batu Badak	Pemuda Desa Batu Badak membawa istri orang lain.

Fenomena keterbukaan atas permasalahan dan konflik sosial bagi Coser menunjukkan representasi hubungan yang stabil. Dengan kata lain, konflik terselubung tanpa ada pengakuan secara terbuka jauh lebih menghancurkan sistem dan tatanan sosial, karena sulit diidentifikasi. Dengan demikian, konflik sebenarnya dapat menunjukkan kekuatan dan stabilitas suatu hubungan sekaligus sebagai mekanisme penyeimbang.<sup>19</sup> Namun, konflik tetaplah harus ditangani baik dalam posisi masyarakat sebagai pihak yang terlibat maupun sebagai pihak ketiga dalam membantu para pihak yang berkonflik agar sistem sosial berjalan dan dapat beradaptasi dengan baik. Coser

<sup>19</sup> Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.

memberikan tawaran konsep “Katup Penyelamat” (*Safety Valve*) salah satu mekanisme khusus untuk mempertahankan dan memperbaiki struktur dari kemungkinan kerusakan akibat konflik. Adapun bentuk Katup Penyelamat yang dimiliki masyarakat Desa Batu Badak ialah sistem kekerabatan “Tradisi Damai”, yaitu sebuah tradisi pasca konflik dalam menyelamatkan hubungan antar individu maupun kelompok yang berkonflik melalui serangkaian acara adat dan keagamaan.

Kekerabatan yang menjadi kekuatan Tradisi Damai telah merubah permusuhan menjadi hubungan yang lebih intens antar pelaku konflik. “*Musuh jadi keluarga*”, nilai inilah yang setidaknya dirasakan oleh Informan R dan H, yang mana keduanya merupakan aktor praktek Tradisi Damai sekaligus salah satu pelaku konflik dari sederet fenomena di atas. Sebagai orang yang lahir dan besar menjadi pribumi, keduanya tahu betul bagaimana mempertahankan struktur dan hubungan antar sesamanya ditengah gempuran konflik yang mendera. Manifestasi nilai budaya sebagai resolusi konflik telah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Bagi informan H misalnya, sebagai orang yang cukup sering melakukan Tradisi Damai, baginya kearifan lokal tersebut tak hanya membantu dalam menyelesaikan konflik namun juga membangun hubungan keluarga kepada pelaku konflik lainnya. Informan R pun mengungkapkan hal yang sama, hubungan ‘*saudara*’ yang terjalin antara ia dan Informan H telah berjalan selama sembilan tahun lamanya sejak keduanya melakukan Tradisi Damai pada tahun 2012 lalu. Konflik dan perasaan permusuhan pun tak lagi mencuat sejak hari itu, bahkan kini keduanya sangat dekat layaknya saudara kandung.

Informan R dan H juga pernah terlibat praktek Tradisi Damai secara kelompok, yaitu pasca konflik antara pemuda desa Batu Badak dengan pemuda Kampung Bojong. Pertikaian (tawuran) yang bermula dari kesalahpahaman itu berakhir dengan melakukan Tradisi Damai sebagai bentuk perdamaian untuk tidak melanjutkan dendam diantara kedua kelompok tersebut. Menurut Informan R, saat itu ada sekitar 16 (enam belas) orang yang mengikuti Tradisi Damai dan siap diikat menjadi keluarga. Merekapun mengakui kekuatan yang diberikan dari tradisi tersebut.<sup>20</sup> Konstruksi sosial yang terbangun lewat nilai – nilai adat telah memelihara struktur dan tatanan masyarakat dari ancaman konflik.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Informan R pada 03 Juli 2021

## 2. Tradisi Damai sebagai Mekanisme ‘Katup Penyelamat’

### a) Pelepasan Ketegangan melalui “*Sumpah Persaudaraan*”

Masyarakat Lampung Timur sangat kuat menjaga tradisi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial. Seperti falsafah nilai-nilai *Pi'il Pasenggiri* yang masih kokoh dipertahankan dalam menjaga keharmonisan antar masyarakatnya. Tak luput dari identitas mereka sebagai daerah rawan konflik, masyarakat pun memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap segala ancaman akibat konflik. *Nemui-Nyimah* ialah bagian kecil dari buah sensitivitas masyarakat yang hingga sekarang menjadi tameng dalam menghadapi ancaman. *Nemui-Nyimah* merupakan asas kekeluargaan yang mewajibkan masyarakat Lampung untuk tetap menjaga silaturahmi agar ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip tampil, kepantasan dan kewajaran.<sup>21</sup> Prinsip yang sama juga dilanggengkan oleh komunitas adat desa Batu Badak yang terikat pada sistem kekerabatan ‘marga’, atau *Marga Sekampung* Udik dengan nama adat Panimbang. Prinsip “*satu marga, satu keluarga*” merupakan perwujudan dari asas *Nemui-Nyimah* itu sendiri. Pada praktiknya, nilai budaya keduanya terealisasikan melalui ritualisasi pasca konflik “Tradisi Damai”.

Pada dasarnya “Tradisi Damai” sendiri merupakan proses ritualisasi untuk pengangkatan saudara yang dilegalisasikan oleh lembaga adat dan dilakukan berdasarkan nilai kekerabatan adat Panimbang dan ajaran agama Islam. Tradisi ini sebenarnya tak hanya berlaku untuk masyarakat yang terlibat konflik saja namun juga, bagi siapa saja yang ingin membangun hubungan kekerabatan di antara mereka yang ingin ber ‘damai’ jika terjadi kesalah-pahaman. Secara khusus studi ini memfokuskan pembahasannya pada tradisi yang dilatarbelakangi konflik. Ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan oleh masyarakat bilamana ingin melaksanakan “Tradisi Damai”. Untuk tahap awal yang dilakukan yaitu konsolidasi internal dengan melibatkan lembaga adat dan tokoh agama sebagai pihak mediator yang menyampaikan pesan perdamaian dari pihak satu ke pihak lainnya yang terlibat konflik. Selama proses mediasi berlangsung, terjadinya tawar-menawar perihal perjanjian dan tuntutan yang diberikan. Tuntutan tersebut bisa berupa uang ganti rugi, bertanggung jawab atas penyembuhan luka yang dialami korban atau

<sup>21</sup> Syani, Abdul. “Falsafah Hidup Masyarakat Lampung sebuah Wacana Terapan.” 2 April 2013.

perjanjian pasca perdamaian dan syarat –syarat lainnya sebagai bentuk persetujuan dilangsungkannya “Tradisi Damai”.

“Damai itu ya kesepakatan untuk memaafkan. Namun jika salah satu pihak ada yang dirugikan secara fisik, maka pihak lain yang berbuat harus memberikan ganti rugi atau merawatnya hingga sembuh. Tetapi jika pihak yang rugi itu memaafkan dan tidak mempermasalahkan, maka mengganti rugi materi tidak wajib. Intinya adalah sembuh batin dan fisiknya.<sup>22</sup>

Jika mengikuti pola pikirnya Coser, konflik tidak dimaknai sebagai hal negatif saja, selama konflik tersebut menyelesaikan ketegangan antar kelompok dan pribadi yang terlibat konflik. Mekanisme penerimaan dan permintaan tindakan orang lain bagi korban yang rugi dan juga pengakuan yang jujur dari para pelaku dapat berfungsi mengintegrasikan hubungan kedua pihak, meski akan ada perubahan atau syarat-syarat dalam hubungan tersebut seperti kasus di atas. Hak itu terjadi karena menyangkut dengan kepentingan atau nilai yang tidak bertentangan dengan dasar hubungan tersebut. Selama kedua belah pihak tidak merasa diberatkan maka tuntutan yang diajukan pun diterima dengan terbuka, ataupun sebaliknya kedua pihak dapat sepakat untuk tidak saling menuntut. Peran ‘Katup Penyelamat’ pun mulai berjalan dengan baik dengan adanya pergeseran pada pemuasan kebutuhan konflik terhadap objek pengganti.

Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan “Tradisi Damai” itu sendiri. Setelah segala kesepakatan dan tuntutan telah disetujui, maka pihak pertama yang ingin ber- ‘damai’ mempersiapkan kebutuhan acara tersebut. Mulai dari tempat untuk menampung para tamu atau masyarakat yang menjadi saksi, serta makanan dan minuman sebagai sajian selama acara. Kemudian, ada aturan yang mewajibkan keluarga untuk menyiapkan sewadah makanan berisi nasi dan lauk pauk yang dibuat secara khusus untuk dimakan bersama oleh orang yang terlibat konflik secara langsung. Setelah semua persiapan dirasa sudah siap, kemudian pihak keluarga maupun lembaga adat mengundang kepada seluruh masyarakat untuk menghadiri sekaligus menjadi saksi penyatuan keluarga baru tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Keintiman dalam menyelesaikan konflik sosial juga tampak dalam ritual mengangkat saudara dan menganggap saudara bagi kedua belah pihak yang

---

<sup>22</sup> Wawancara Informan G, 02 Juli 2021.

berkonflik. Bagi kedua kelompok yang sama-sama beragama Islam, maka akan disumpah menggunakan Al-Qur'an yang dipimpin oleh tokoh agama dan diikuti seluruh warga sekitar. Tahapan selanjutnya dari proses 'damai' adalah pengucapan janji atau sumpah "*Persaudaraan*" yang berisi pengakuan tali persaudaraan yang akan dijalin serta perjanjian yang telah disepakati saat proses mediasi sebelumnya. Istilah yang dipakai biasanya berupa "*Keluargaku adalah keluargamu, keluargamu adalah keluargaku*". Pengucapan sumpah tersebut pun diucapkan di depan kitab suci Al-Quran dan saksi seluruh masyarakat yang hadir. Tujuannya pun sangat jelas, agar sumpah yang diucapkan dilakukan sungguh-sungguh atas dasar agama dan keyakinan karena isi dalam sumpah itu berlaku hingga pada keturunannya.

"Damai' itu adalah tidak saling mengancam, ada lagi yang berdamai agar bersungguh-sungguh maka menggunakan Al – Quran, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya. Bahkan kita artikan sudah menjadi saudara seperti saudara kandung.<sup>23</sup>

Bagi Informan H sebagai salah satu orang yang pernah melakukan tradisi tersebut menganggap bahwa penggunaan kitab suci Al-Quran adalah bentuk penyadaran atas perilakunya yang dianggap tercela dan menyimpang dalam norma masyarakat. Tak hanya itu, informan pun menambahkan bahwa agama adalah hukum alam yang paling mujarab dalam menghukum pihak yang melanggar sumpah persaudaraan tersebut.

Tahapan yang terakhir yang dilakukan adalah dengan makan bersama menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak keluarga yang terlibat konflik. Jamuan yang disajikan biasanya dari aneka kue-kue tradisonal hingga makanan berat seperti nasi, berbagai macam lauk pauk seperti daging sapi, ayam, ikan serta sayur mayur sebagai pendamping. Mereka secara kekeluargaan duduk bersila melingkar (*Jaula*) dan bersama-sama menyantap makanan tersebut sembari bersenda gurau. Hal yang penting pada tahapan ini yaitu para pihak yang berkonflik atau masyarakat yang bersumpah tadi duduk dan makan bersama pada satu wadah yang telah disiapkan. Wadah tersebut berisi nasi dan satu ekor ayam bakar utuh

---

<sup>23</sup>Wawancara Informan H, 02 Juli 2021.

sebagai simbol suka duka kehidupan yang nantinya dirasakan bersama sebagai seorang saudara.

Melihat serangkaian tahapan ritualisasi di atas, masyarakat desa Batu Badak tahu betul bagaimana memelihara fungsi konflik dan arti penting lembaga adat lewat tradisi peredam konflik yang Coser sebut sebagai katup penyelamat.<sup>24</sup> Coser juga menambahkan bahwa konflik terkadang merevitalisasi norma dan kerangka aturan yang baru. Proses memodifikasi sistem sosial ini sebenarnya menunjukkan bahwa konflik memberikan peringatan terhadap tatanan sosial yang tak lagi sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat.<sup>25</sup> Perubahan status dari musuh menjadi saudara antar pihak yang terlibat konflik dalam tradisi ‘Damai’ menjadi contoh nyata dari konsep Coser tersebut, dimana pengucapan sumpah persaudaraan membuat moralitas semua pihak semakin menguat dan terpelihara dengan baik. Selain itu, isi perjanjian yang melarang mereka untuk mengulangi tindakan konflik pun membentuk sistem sosial yang baru, segala agresifitas yang dapat memicu konflik dapat diredam dengan kerekatan emosi. Perubahan pun tak hanya berpengaruh pada antar pihak yang berkonflik namun juga berkontribusi atau membentuk perubahan sosial dengan memperkenalkan mekanisme budaya dalam upaya penyelesaian konflik kepada generasi penerus yang jika sewaktu-waktu mengalami konflik.

#### **b) “Tradisi Damai” sebagai Perwujudan dari Fungsional Konflik**

Istilah kecerdasan budaya sepertinya pantas disematkan pada masyarakat desa Batu Badak. Kemampuan dalam memahami, berpikir, berperilaku dan mengelola hubungan sosial secara efektif dalam situasi perbedaan antar budaya yang dapat mengancam disintegrasi sosial, mereka menciptakan suatu tatanan untuk mengubah ketegangan menjadi keintiman. Menurut Early dan Ang<sup>26</sup> untuk memahami konsep kecerdasan budaya ini patut memiliki empat faktor penting, berikut: 1) *Pengetahuan*, terhadap struktur, norma, kultur dan praktik-praktiknya ditengah perbedaan sosial budaya masyarakat; 2) *Strategi*, menemukan dan mengembangkan cara atau aturan baru untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan sosial; 3) *Motivasi*, keterlibatan masyarakat secara efektif dalam

<sup>24</sup> Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Amrullah, Muslim, Sri Nurhidayati, Wiwi Noviati, dan M. Salahuddin. “Kecerdasan Budaya dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Dialektika* Vol. 3. No. 1, 2018: 1-32.

perbedaan antar budaya; dan 4) *Perilaku*, menunjukkan identitas budaya yang dimiliki dengan bertindak sesuai norma dan aturan yang ada. Para pelaku “Tradisi Damai” tentu memiliki keempat kemampuan tersebut. Memahami bagaimana panasnya gesekan antar budaya di Lampung Timur memberi penekanan bagi mereka dalam mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai alat penguat integrasi dan intensitas hubungan antar anggota kelompok pribumi.

Konsepsi pembentukan kecerdasan budaya terkait langsung dengan pengelolaan konflik yang baik oleh masyarakat sehingga tidak melahirkan keretakan. Konflik justru berfungsi menciptakan budaya baru “Tradisi Damai” sebagai resolusi konflik yang efektif membangkitkan dan mengaktifkan peran individu sebagai bagian dari kelompok untuk mengelola dinamika konflik.<sup>27</sup> Konsep dasar Coser sebagai seorang tokoh yang mendalami teori konflik berpandangan bahwa konflik akan selalu ada karena adanya perbedaan, hanya saja adanya konflik tidak harus selalu dipandang secara negatif. Baginya konflik itu sudah lengket (*inherent*) di setiap lapisan sistem masyarakat itu sendiri. Untuk itu, Coser memberikan sepuluh proposisi yang disebutnya sebagai fungsi – fungsi konflik. Dalam artikel ini beberapa buah pemikiran Coser tersebut memiliki relevansi dengan nilai budaya “Tradisi Damai” khususnya pada konsep Katup Penyelamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

*Pertama*, adanya “Tradisi Damai” ini menjadi jaminan pelepasan permusuhan dan ketegangan antar masyarakat. Coser menjelaskan bahwa konflik dapat dimanfaatkan untuk hubungan antara pihak yang bertentangan. Seseorang cenderung bebas meluapkan ekspresi permusuhan ketika berada pada kelompok yang memiliki hubungan yang kuat dan toleransi terhadap peristiwa konflik, sehingga tiap individu merasa aman tanpa terancam akan perpecahan. Masyarakat desa Batu Badak menjadi salah satu kelompok yang memiliki nilai tersebut dimana mereka telah mampu mengelola mekanisme penyelesaian sebuah konflik dengan baik. Para pihak yang berkonflik yang puas meluapkan agresifitasnya dapat menyambungkan hubungannya kembali dengan melakukan “Tradisi Damai”.

*Kedua*, “Tradisi Damai” dapat menjadi wadah penyelesaian perbedaan *dualisme* untuk mencapai persatuan. Konflik yang seringkali memberi pesan

---

<sup>27</sup> Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*.

adanya penekanan atau penderitaan yang dirasakan masyarakat dapat menjadi nilai ukur hubungan sosial untuk revitalisasi persatuan dan keseimbangan dalam kelompok.<sup>28</sup> Proses mediasi antar pihak dalam tahapan “Tradisi Damai” menjadi ruang “demonstrasi” terhadap kebenaran dan tuntutan objek konflik yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan kesediaan menerima tuntutan dari satu pihak ke pihak lain menjadi komponen dalam upaya pencapaian persatuan yang disebut dengan ‘Damai’.

*Ketiga*, “Tradisi Damai” dan konflik pada masyarakatnya sebagai bentuk capaian stabilitas hubungan sosial. Coser menilai bahwa ukuran stabilitas hubungan dalam suatu kelompok dapat dikatakan stabil bilamana hadirnya ekspresi permusuhan dan pertentangan pada masyarakat tersebut. Sebagai daerah dengan julukan rawan konflik, masyarakat desa Batu Badak selalu berdampingan dengan berbagai konflik sosial yang terjadi di sana. Tak hanya stigma soal konflik masyarakat pun terkenal dengan solidaritas dan sistem kekerabatannya yang kuat. Dengan semboyan “*satu marga satu keluarga*” menjadi bagian paling penting dalam “Tradisi Damai” untuk menguatkan moralitas kelompok. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tingginya pertumbuhan konflik pada masyarakat tersebut maka menguat pula kohesi internal mereka.

*Keempat*, “Tradisi Damai” mengaktifkan peran individu yang terisolir dengan melibatkannya pada tahapan ritualisasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tahapan pelaksanaan tradisi ini tak hanya melibatkan pihak yang berkonflik saja namun juga pihak lembaga adat, keagamaan dan masyarakat sebagai upaya konsolidasi penyelesaian konflik. “Tradisi Damai” yang disebut Coser sebagai mekanisme katup penyelamat telah membangkitkan peran lembaga sosial, adat maupun agama secara aktif pada keterlibatannya dalam menyelesaikan konflik. Coser berpendapat bahwa individu yang berpartisipasi secara ekstensif dalam kelompok biasanya peduli dengan keberlangsungan kelompok tersebut.<sup>29</sup> Fungsi konflik yang tampak yaitu dapat mengaktifkan individu yang sebelumnya terisolasi menjadi lebih aktif dan berkontribusi pada kelompok dengan menjadi saksi sumpah persaudaraan dan kontrol sosial para pelaku “Tradisi Damai”.

---

<sup>28</sup> Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<sup>29</sup> *Ibid*

*Kelima*, “Tradisi Damai” dapat mereplikasikan fungsi konflik sebagai pembentuk dan pemelihara identitas kelompok. Kondisi sosial yang majemuk dan rivalitas yang tinggi memberikan batasan-batasan kelompok menjadi semakin jelas. Hal tersebut dapat menguatkan identitas dan otonomi dalam suasana kesatuan.<sup>30</sup> Sifat “Tradisi Damai” yang dibalut eratnya unsur kekerabatan, gotong-royong dan kebersamaan adalah sebagai upaya pemeliharaan tatanan sosial dan identitas mereka sebagai sebuah keluarga (satu marga) di tengah konflik yang sedang terjadi. Dengan berjalannya nilai-nilai budaya “Tradisi Damai” dapat menjadi penyaluran ekspresi persaudaraan dan menghilangkan permusuhan. Dengan demikian maka, tatanan sistem sosial berjalan secara fungsional bagi masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Konflik sosial acapkali dipandang disfungsi dalam masyarakat, padahal di balik keagresifannya konflik juga memiliki fungsi positif dan menjaga keseimbangan sistem sosial. Lewis Coser mencoba menunjukkan fungsi-fungsi konflik pada masyarakat dengan prasyarat katup penyelamat. Artikel ini telah meminjam pemikiran tersebut melalui penelitian terhadap fenomena sosial “Tradisi Damai” di masyarakat Desa Batu Badak Lampung Timur sebagai katup penyelamat yang meredakan konflik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat lima konsep pemikiran Coser yang selaras dengan fenomena yang diteliti, antara lain (1) pelepasan agresivitas para pihak yang berkonflik tanpa merusak hubungan; (2) media penyelesaian perbedaan *dualisme*; (3) menunjukkan stabilitas kelompok; (4) mengaktifkan partisipasi individu pada kelompok; dan (5) menguatkan identitas kelompok.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, Muslim, Sri Nurhidayati, Wiwi Noviati, dan M. Salahuddin. “Kecerdasan Budaya dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Dialektika Vol. 3. No. 1*, 2018: 1-32.
- Budianto, Aan. “Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an.” *Jurnal Candi Vol. 20 No.1*, 2020: 18-31.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

- Coser, Lewis. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1956.
- Jaya, Tri Purna. *Awal Mula Kedatangan Transmigran Jawa ke Lampung*. Artikel, Jakarta: Okezone.com, 2013.
- Muslihah, Eni. *Komnas HAM: Lampung Masuk Tiga Besar Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Kompas.com, 2015.
- Nursantari, Arum R. "Konflik Sosial dalam Novel "O" Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Lewis A. Coser)." *BAPALA*, 2018: 1-7.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rosyana, Elly. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)*. *Al-AdYaN*, Vol X No 2, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syani, Abdul. "Falsafah Hidup Masyarakat Lampung sebuah Wacana Terapan." 2 April 2013.